



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KESEHATAN  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **INDAH FEBRIANTI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN**
3. NHK : **236670**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.515.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>583.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX TYPE V BENSIN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>104.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>87.046.637</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.289.046.637
III. HUTANG	Rp.	1.213.033.032
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.076.013.605

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.